

Islam, Budaya dan komunikasi antarbudaya Islam di Indonesia (Analisa Hubungan Agama-Negara Pasca Pembubaran HTI)

Rofi'ah

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor
rofiahsiddiq@gmail.com

Abstract

The occurrence of contacts between various ethnic groups in Indonesia, the different respond to socio-political conditions in Indonesia, the occurrence of Indonesian Islamic affiliations with various countries, gave diverse Islamic cultures with various roles and functions in the history of Indonesia's development since colonial period. to the existence, role and function of various existing Islamic cultural identities, conflict of identity cannot be avoided. This condition requires an intercultural communication with the principle of mutual understanding, mutual respect and mutual support, as in the concept of intercultural communication by Ting-Toomey (1999). Government support for one of the Islamic cultures in Indonesia has triggered a conflict of triangles between the government, Islamic culture mainstreams and Islamic culture streams. With the constructivism paradigm, this study interpreted social facts constructed based on subjective experience of informants. Qualitative data and analysis were obtained from twenty informants as sources of research in Bogor

Keywords: Islamic Culture, islamic Mainstream , Islamic Stream.

1. PENDAHULUAN

Perjalanan panjang agama Islam di Indonesia membentuk budaya Islam yang beragam. Dimasa awal perkembangan Islam di Indonesia, selain berkat persentuhan dengan berbagai budaya di Indonesia, budaya Islam Indonesia juga terbentuk berkat afiliasi dengan berbagai negara terutama Barat dan Timur.

Pada awal perkembangan Islam di Indonesia hingga pada masa penjajahan, umat Islam melakukan intensitas afiliasi yang sangat tinggi pada dunia Timur Tengah terutama pada Makkah dan Madinah sebagai

tempat lahir dan berkembangnya Islam. Afiliasi ini terutama diwarnai oleh konsep hubungan primordial religius dan berlanjut pada model hubungan akademik bahkan politik. Pada perkembangan selanjutnya terutama ketika politik Islam runtuh dan berbagai negara Islam mengalami kemunduran, mereka mengakomodasi keadaan dan konflik Timur Tengah sebagai bagian dari Agamanya. Maka lahirlah wacana khilafah Islam sebagai suatu konsep budaya didalam Islam yang diusung oleh kelompok ini sebagai wacana mengatasi permasalahan kemunduran dunia Islam.

Sementara itu dimulai pada masa pasca kemerdekaan, terdapat kelompok lain dalam masyarakat Islam Indonesia yang mulai berafiliasi dengan negara-negara Barat. Afiliasi ini kemudian membentuk suatu budaya Islam Modern yang lebih dikenal dengan nama budaya Islam Moderat. Nama ini terus berkembang berkat kemampuan mempersesuaikan konsep Islam moderat dengan karakteristik budaya di Indonesia dan selanjutnya lebih dikenal sebagai Islam nusantara sebagaimana yang di canangkan presiden Joko Widodo. Dalam sejarah politiknya, kelahiran Islam model ini dimotori sekelompok generasi muda Islam yang pulang ke Indonesia setelah selesai menempuh pendidikan di berbagai negara Barat. Mereka berupaya menemukan jalan agar Islam kembali dapat berkiprah di kancah politik setelah dimasa sebelumnya menyandang streotipe negatif sejak masa penjajah sampai dimasa kepemimpinan Suharto. Afiliasi para pemuda Islam ini dengan keilmuan Barat berhasil mengembalikan Islam kejalur politik Indonesia dan mendapatkan simpati rezim Suharto dengan jargon baru “Islam Moderat”(Sukamto, 2008:10)

Kelompok Islam yang berafiliasi dengan di timur tengah, melahirkan bentuk budaya yang khas. Kelompok ini bercirikan mengadosi dari mulai bahasa arab dalam percakapan keseharian, model pakaian khas timur terngh, dan terutama konsep-konsep

pemikiran muslim timur tengah seperti konsep khilafah.

Adapun kelompok kedua, afiliasi dengan dunia Barat membuat mereka mengadopsi pemikiran-pemikiran Barat, bahasa dan juga pakaian ala barat. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa pada tahun 1980-an bermunculan penyandang Ph.D., seperti Amien Rais, Kuntowijoyo, Yahya Muhaimin, dimana komitmen mereka terhadap Islam sangat kuat (Nasution, dkk., 1990:87). Berkat pendidikan modern Barat yang mereka peroleh, mereka mampu mengembangkan kecakapan intelektual dan profesional. Hal ini melahirkan suatu proses yang disebut *embourgeoisement* atau *priyayisasi* kaum santri (Azra, 2006:22). Pada tahun 1980-an para lulusan ini menduduki jabatan menengah di birokrasi, mereka melakukan perubahan dari dalam, sehingga mendorong terjadinya Islamisasi di kalangan para birokrat (Azra, 2006:55). Gelombang umat Islam yang belajar keluar negeri menurut Marwah Daud Ibrahim telah mengubah *image* Islam. Islam itu universal, sangat terbuka, kosmopolit. Golongan ini kemudian lebih dikenal sebagai kaum baru Islam moderat. (Nasution, dkk., 1990:90).

Organisasi massa Hizbutahrir Indonesia (HTI), sebagai mana semua ormas Islam yang berafiliasi dengan timur tengah (Ahnaf, 2016:132), lahir dengan suatu konsep yang bertentangan dengan ide yang

berkembang pada masanya. Disaat semua negara menyerukan nasionalisme dan dengan konsep tersebut banyak negara terutama negara terjajah terbukti berhasil meraih kemerdekaannya, maka ide transnasional yang di usung HTI menjadi terkesan sebagai suatu penentangan. Karena itu pulalah organisasi ini diberbagai negara banyak di tolak keberadaan dan eksistensinya dicurigai sebagai tindakan makar (Sofwan, 2016:99).

Demikian pula di Indonesia, Pembubaran HTI oleh pemerintah adalah dalam rangka menjaga keamanan dan ketahanan bangsa dalam naungan NKRI. Konsep khilafah yang di usung oleh HTI dipandang sebagai ancaman bagi pancasila. Namun pasca pembubaran ormas HTI yang menandai dilarangnya semua kegiatan dengan menggunakan atribut HTI, dakwah organisasi ini tetap berjalan seperti biasa, hanya saja tanpa atribut HTI yang terpampang dalam setiap kegiatan tersebut. hal ini, sebagaimana menurut pemerintah, tidak melanggar aturan pembubaran. Demikian juga pada anggota eks HTI pasca dibubarkan, tidak ada gejolak yang berarti meskipun organisasinya dibubarkan. Anggota eks HTI tetap berdakwah seperti biasanya, meskipun tanpa atribut ormasnya. Adapun pemerintah, setelah mengeluarkan perintah pembubaran, sejauh ini tidak ada tindak lanjut yang dilakukan, kecuali pernyataan bahwa penanganan diserahkan pada daerah dimana HTI berada untuk

diawasi kegiatannya. Yaitu sejauh tidak memperlihatkan atribut HTI, maka kegiatan dakwah tidak dilarang.

Hubungan Internasional

Dalam kajian-kajian Hubungan Internasional kontemporer, hubungan-hubungan yang melintasi batas negara dengan berbagai tujuannya itu telah terjalin sejak berakhirnya perang dunia kedua. Saat itu kesadaran akan kerugian peperangan memotivasi para pemimpin dunia dalam menciptakan konsep hubungan-hubungan lintas negara demi perdamaian dunia, dan mengamankan berbagai kepentingan dunia internasional. transnasionalisme sebagai salahsatu bentuk hubungan lintas negara menjadi tema yang mulai dibicarakan sejak akhir 1980-an terutama dalam fungsinya yang merubah bentuk bentuk hubungan internasional.

Menurut James Rosenau, transnasionalisme adalah proses di mana hubungan internasional yang dilangsungkan oleh pemerintah telah disertai oleh hubungan antara individu, kelompok, dan pihak swasta. Proses hubungan ini memiliki konsekuensi penting bagi dunia internasional (lihat Jackson dan Sorensen, 2007: 101). Transnasionalisme melihat negara bukan lagi aktor utama dalam setiap interaksi hubungan internasional. Dalam konteks reformasi di Timur Tengah pada 2011 yang kemudian

dikenal dengan istilah arab spring, aktor di balik transnasionalisme adalah individu dan kelompok-kelompok individu, terutama para pemuda. Transnasionalisme model baru ini selain bukan penyebab langsung revolusi di Timur Tengah, melainkan dampak dan *resultante* politik dari ketidakpuasan rakyat atas rezim yang berkuasa, juga bersifat instrumental atas perubahan perubahan politik. Artinya, aktivisme transnasional yang berlangsung di TimurTengah yang berhasil memanfaatkan ruang publik melalui jejaring media sosial tidak lagi berbasis ideologi khas Timut Tengah. Hassan Nafaa, seorang profesor ilmu politik di Universitas Kairo, menyebut para pemuda sebagai “*the Internet Generation or the Facebook Generation orjust call them the Miracle Generation.*” (Ghosh, 2011a).

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimanakah hubungan Agama-Negara pasca pembubaran HTI?
2. Bagaimanakah Model Dakwah Transnasional Baru?

Sementara itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikutt ;

1. Menganalisa bagaimanakah hubungan Agama-Negara pasca pembubaran HTI
2. Menganalisa bagaimanakah Model Dakwah Transnasional Baru

Teori negosiasi identitas

Penelitian ini menggunakan teori negosiasi Identitas yang dipopulerkan oleh Stella Ting-Toomey (1999). Belum terjadinya saling pengertian, saling menghargai dan saling mendukung diakibatkan oleh ketidaksetaraan posisi pada kedua model budaya Islam yang menjadi kubu *mainstream* dan kubu *stream* di Indonesia, dimana Islam moderat yang merupakan budaya Islam *mainstream* di Indonesia merasa memiliki posisi dan kekuasaan yang lebih unggul dari pada Islam radikal yang merupakan budaya Islam *Stream*. Hal ini mengakibatkan negosiasi Identitas tidak mendapatkan hasil yang baik, atau bersifat *mindless*. Pemerintah yang semestinya menjadi pasilitator, justru masuk dan menjadi bagian dari konflik yang terjadi. Dukungan pemerintah pada salah satu model budaya Islam, memperparah kegagalan negosiasi identitas antarbudaya-budaya Islam tersebut disatu sisi dan mengakibatkan memburuknya hubungan Agama-Negara disisi lain.

2. TINJAUAN LITERATUR

Konsep Hubungan Negara-Agama dalam Islam

Dalam tradisi pemikiran politik Islam, dapat di temukan tiga tipologi hubungan antara negara dan Agama. Pertama, Agama dan negara tidak bisa dipisahkan (menekankan paradigma integralistik). Kedua, Agama dan negara berhubungan secara

simbiotik substantif. Ketiga, Sekuralistik (agama dan negara ditempatkan secara terpisah) (Abdullah, 2017:5). Uniknya ketiga konsep ini lahir berdasarkan kajian terhadap fenomena yang sama yaitu masa ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan umat Islam terkait nabi sebagai contoh dalam perilaku berpolitik Islam, hanya saja mereka berbeda dalam menginterpretasikan contoh tersebut. Perbedaan interpretasi nampaknya terjadi akibat kenyataan-kenyataan yang ditemui di masyarakat tempat para konseptor itu hidup, sehingga lahirnya perbedaan konsep sangat mungkin terjadi. (Hasan, 2014:301)

Pertama, paradigma Integralistik. Paradigma ini mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Islam adalah *din wa dawlah*. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Antara keduanya merupakan totalitas utuh dan tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektif ini, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, bahwa syari'ah Islam harus diterima sebagai konstitusi negara, bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan. Pandangan ini melihat bahwa gagasan tentang negara bangsa (*nation-state*)

bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik dan teritorial. Para penganut paradigma ini diantaranya adalah Sayyid Quthb (1906-1966), Abu al-A'la al-Mawdudi (1903-1979).

Kedua, Paradigma Simbiotik Substantif. Paradigma ini mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan negara. Sebab, melalui negara, agama dapat berbiak dengan baik. Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan melalui kekuasaan negara. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan kehadiran agama, karena hanya dengan agama suatu negara dapat berjalan dalam sinaran etik-moral.

Paradigma ini juga memandang bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh *ummah*. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur'an yang merujuk pada kekuasaan politik dan otoritas, ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Al-Qur'an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis yang kemudian menjadi landasan bagi aktivitas sosial dan politik umat manusia. Para pemikiran ini, di antaranya adalah Mohamad

Husayn Haykal (1888-1956),¹⁴ Muhammad Abduh (1849-1905), Fazlurrahman (1919-1988). Menurut mereka, pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting. Bagi pendapat ini, yang pokok adalah bagaimana substansi agama merasuk dalam penyelenggaraan negara. Sehingga negara bisa menjadi instrumen dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama, dapat menjamin tumbuhnya nilai-nilai berdasarkan agama.

Ketiga, Paradigma Sekularistik. Paradigma ini menolak kedua paradigma sebelumnya; integralistik dan substantif. Sebagai gantinya, diajukanlah konsep pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam, atau menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individual semata. perkataan lain, aliran ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak bertali temali dengan urusan kenegaraan. Para pemikir politik yang masuk dalam kategori paradigma ketiga adalah Ali Abdurraziq (1888-1966), Thaha Husein (1889-1973), Ahmad Luthfi Sayyid (1872-1963), kemudian disusul belakangan oleh Muhammad Sa'id al-Asymawi (Mesir, lahir 1932). (Hasan, 2014:307)

Di Indonesia ketiga konsep ini mendapatkan pendukungnya masing-masing dan ketiganya mewarnai perpolitikan di Indonesia. Sekulerisme agama – negara pada masa awal kemerdekaan di anut oleh presiden pertama RI Sukarno dimana dalam hal ini sejarah mencatat perdebatan sengitnya dengan Mohammad Natsir yang menolak sekulerisme agama-negara, dan pada masa modern dikembangkan oleh Nur Cholis Majid dengan semboyannya yang terkenal *Islam yes, partai Islam no.* (Abdullah. 2017:8)

Para penganut paham ini yang kemudia berpolitik di partai-partai nasionalis yang tidak menggunakan ideologi Islam seperti Golkar, PDIP, Demokrat dll. Yang kedua, Islam formalistik di dikembangkan oleh tokoh klasik Islam Indonesia seperti Muhammad Natsir dan di lanjutkan pada era modern oleh orang-orang yang tergabung dalam ormas HTI, Ikhwanul Muslimin, FPI dll yang sebagiannya kemudian berpolitik melalui partai politik Islam seperti PBB dan PKS, meski belakangan PKS menjadi partai terbuka. Yang ketiga adalah konsep Islam integrative. Paham ini di Indonesia adalah yang termuda diantara dua sebelumnya, yang lahir pada masa orde baru para konseptornya seperti Gus Dur, Syafii Maarif dan Amin Rais. Mereka kemudian mendirikan partai terbuka namun dengan basis pendukung massa yang terhimpun dalam ormas Islam kultural yaitu NU dan Muhammadiyah. (Ekawati. 2015: 29)

Partai politik Islam Versus Organisasi Massa Islam

Pada masa orde baru, dengan mengkampanyekan Islam kultural sebagai jalan berkontribusi bagi pembangunan manusia Indonesia, dan bahwa hubungan agama dengan negara bersifat substantif sehingga formalisasi Islam di tingkat negara tidak diperlukan. Hal ini akhirnya mendapatkan respon positif dari pemerintah kala itu, di tandai fenomena jabat tangan Gus Dur dengan presiden Suharto. Masa ini adalah dimulainya hubungan yang akrab antara negara dengan masyarakat Islam kultural, dengan kepentingan baru pada partai Islam atas negara berupa menjadikan agama sebagai ruh dalam bernegara. (Herdiansah. 2017:160)

Namun pada masa selanjutnya, ketika para pengusung konsep substantif ini ternyata gagal mewujudkan cita-citanya terutama pada era reformasi hingga berakhir dengan digulingkannya Gus Dur dari kursi kepresidenan, membangkitkan kekecewaan sebagian besar umat Islam terhadap pertikaian antar wakil-wakil mereka itu, di tambah lagi pada masa selanjutnya fenomena partai politik Islam diwarnai oleh bermacam tindak kriminal dan amoral para anggota partai Islam, maka konsep Islam substantif mulai diragukan keabsahannya sebagai wakil dari kepentingan Islam. Dalam kondisi inilah ormas-ormas Islam berbasis Islam formalis kembali tampil dengan simbol-simbol Islam

yang lebih kuat dari sebelumnya dengan membawa wacana tentang pentingnya menerapkan prinsip Islam secara formal dalam aturan bernegara, sebagai solusi atas krisis multi dimensi saat ini yang dipandang sebagai akibat dari merebaknya sekularisme barat disisi lain.

Kondisi ini kemudian menimbulkan konflik dalam tubuh umat Islam. Hubungan sosial antar ormas Islam kubu substantisme dengan kubu Islam formalisme di satu sisi dan diantara kubu Islam formalisme dengan pemerintah disisi lain. Masuknya negara dalam peta konflik ini adalah akibat bangkitnya kenangan pertikaian agama-negara di masa lalu dimana sekelompok organisasi Islam pernah mendirikan negara Islam Indonesia sebagai bentuk kekecewaan mereka pada Sukarno kala itu. Perang wacana diantara mereka tak terelakan. Munculnya beragam isu untuk saling menyerangpun terjadi terutama yang dipertontontan ketiganya di media massa online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN**Gambaran Umum HTI**

Hizbut Tahrir (HT) didirikan pada 1953 oleh Taqi al-Din al-Nabhani di Jerusalem. Al-Nabhani memiliki nama lengkap Muhammad Taqi Al-din ibn Ibrahim ibn Mustafa ibn Ismail ibn Yusuf al-Nabhani. Nama belakangnya, al-Nabhani, dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk

orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara. Al-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Ia wafat pada tahun 1398/1977 M, dan dikuburkan di al-Auza'i, Beirut. Bermula dari Palestina itulah, Hizbut Tahrir (HT) berkembang ke berbagai negara salah satunya Indonesia (Shofwan, 2016:101).

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia antara 1982-1983. Kehadiran Hizbut Tahrir ke Indonesia dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang aktivis Hizbut Tahrir yang tinggal di Australia, datang ke Bogor setelah menamatkan pendidikannya. Al-Baghdadi inilah yang kemudian yang kemudian menyebarluaskan gagasan Hizbut Tahrir melalui interaksi dengan para aktivis Islam di Masjid al-Ghifari, Institut Pertanian Bogor (IPB). Maka, berawal dari Bogor inilah gerakan Hizbut Tahrir (HT) menyebar sampai pelosok Nusantara. HT berkembang pesat setelah rezim Orde Baru tumbang. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa HTI merupakan salahsatu model budaya Islam di Indonesia yang lahir akibat afiliasi Islam dengan Timur Tengah

Konsep Khilafah – Sebuah Konsep Merespon Masalah

Institusi Hizbut Tahrir yang didirikan al-Nabhani pada tahun 1953 merupakan basis perjuangan Hizbut Tahrir untuk mendirikan

kembali daulah khilafah Islam. Peristiwa sejarah dalam Islam yang dipandang Hizbut Tahrir sebagai momentum kehancuran daulah khilafah Islam adalah setelah kekuasaan Abdul Madjid II berakhir. Yakni penguasa ke-38 pada zaman kekuasaan Turki Ustmani. Mengenai hal ini, Sharif Zayed Kepala Kantor Media Hizbut Tahrir wilayah Mesir pernah menyatakan bahwa keruntuhan khilafah pada tahun 1924 masehi berada di tangan Mustafa Kemal. Menurutnya, sejak itulah umat Islam kehilangan seorang gembala yang peduli bagi urusan mereka, yang melindungi Islam dan membela kaum muslim (Mudzakir, 2016:33).

Berdasarkan peristiwa tersebut, Hizbut Tahrir (HT) oleh al-Nabhani dimaksudkan sebagai basis ideologi untuk memperjuangkan umat Islam agar bisa bebas dari kemunduran dan penderitaan yang telah berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Hizbut Tahrir (HT) memandang bahwa upaya untuk membebaskan umat Islam dari kemunduran dan penderitaan adalah jika syariat Islam bisa diterapkan secara menyeluruh. Hizbut Tahrir juga memandang bahwa yang bisa menjamin penerapan syariat Islam adalah daulah khilafah Islam. Maka berawal dari itulah, dalam beberapa Bulletin Dakwah Al-Islam yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, sering temukan seruan untuk menegakkan daulah khilafah Islam (Shofwan, 2016:108).

Sebagaimana telah dipaparkan diawal bahwa konsep inilah yang mengundang kecurigaan pemerintah terhadap ormas HTI. Bahwa mengusung konsep khilafah yang bertentangan dengan konsep nasionalisme menunjukkan HTI tidak patuh pada azas pancasila yang merupakan dasar bangunan negara-bangsa Indonesia. Bahkan meskipun para anggot ormas ini melakukan berbagai klarifikasi yang menolak anggapan anti pancasila terkait hal tersebut, pemerintah tetap membubarkan ormas ini berdasarkan konsep khilafah yang diusungnya. Keputusan pemerintah ini sedikit banyak adalah akibat bangkitnya kenangan tentang pertikaian agama-negara di masa lalu dimana sekelompok organisasi Islam pernah mendirikan negara Islam Indonesia sebagai bentuk kekecewaan mereka perihal dihilangkannya tujuh kata piagam jakarta oleh presiden Sukarno kala itu. Dimana hal ini adalah makar yang mengancam kesatuan NKRI.

Dalam konteks dakwah Islam, transnasionalisme baru terjadi di dunia Islam. Fenomena yang pertama adalah fenomena Arab Spring, suatu revolusi yang terjadi di timur tengah berkat pertukaran informasi di ruag publik virtual yang meleburkan batas batas negara bahkan ideologi. Di motori oleh kaum muda dengan orientasi perjuangan mengkritisi pemerintah, tanpa terskat corak ideologi yang beragam. Yang kedua adalah

fenomena 212, yang dalam skala yang lebih kecil dan lingkup nasional, batas batas perbedaan budaya Islam melebur dan dengan tujuan yang sama yaitu mengkritisi kebijakan pemerintah.

Hal ini perlu dipahami sebagai basis penting dalam pembentukan ruang publik yang melampaui konstruksi lama yaitu ideologi, maupun teritorial negara bangsa, dimana jejaring sosial memiliki peran penting dalam membentuk ruang publik baru ini. Transnasional baru dunia Islam kemudian menemukan bentuk barunya dalam upaya agama ini merespon berbagai masalah yang muncul di dunia Islam, serta merumuskan solusinya, sebagaimana yang terjadi di timur tengah dan 212.

Membenahi Hubungan

Tidak adanya pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap eks HTI, disisi lain sejauh ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan HTI pasca pembubaran orgnisasinya. Namun hubungan antar budaya Islam dan juga hubungan Islam stream dengan pemerintah masih belum berubah. Dipenuhi stereotipe negatif dan saling curiga. Jika hal ini dibiarkan bukan tidak mungkin akan mengarah pada konflik yang lebih besar akibat terlalu bertumpuknya hal-hal negatif diantara masing –masing golongan. Dalam teori negosiasi Identitas yang dipopulerkan oleh Stella Ting-Toomey. Ketika terdapat

ketidak setaraan posisi pada kubu kubu yang bertikai, dimana Islam moderat yang merupakan budaya Islam mainstream di Indonesia merasa memiliki posisi dan kekuasaan yang lebih unggul dari pada Islam radikal yang merupakan budaya Islam Stream, mengakibatkan negosiasi Identitas tidak mendapatkan hasil yang baik, atau bersifat *mindless*, yaitu tidak tercapainya saling pengertian, saling menghargai dan saling mendukung. Kegagalan lain yang mengakibatkan *mindless* berpangkal pada keberpihakan pemerintah terhadap kubu Islam mainsteam, yang mengakibatkan ketidak setaraan semakin tajam bahkan menimbulkan opini publik pada penyudutan terhadap budaya Islam stream. Selanjutnya tidak adanya ruang dialog untuk dilakukan komunikasi antarbudaya terbuka yang bersifat *mindfulness* mengakibatkan substansi konflik tetap terpendam. Ketakutan akan kembalinya masa lalu dari pemerintah, ketakutan akan berkurangnya pamor dari kubu budaya Islam mainstream, dan eksklusifitas kubu Islam stream menjadi akar konflik yang masih terpendam dan belum secara terbuka untuk di dialogkan namun tergambar jelas dalam perang wacana di media-media online.

Konflik Identitas-keamanan dan ketidakamanan identitas dalam wacana

Siapakah sebenarnya yang merasa terancam identitasnya diantara kubu Islam

moderat dan Islam radikal, dapat dilihat dari perang diskursus yang terjadi terutama di media sosial, nampaknya kedua kubu sama-sama merasa terancam keamanan identitas budayanya. Pada kubu identitas budaya Islam radikal, Sebagaimana yang telah diceritakan bahwa dalam sejarahnya model budaya Islam radikal telah menyanggah stereotipe sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga masa kepemimpinan Suharto. Konsep, perkataan dan tindakan kelompok ini terus menerus menuai kritik dan tuduhan negatif yang dialamatkan kepadanya. Kelahiran budaya Islam moderat yang kemudian diterima dengan baik oleh rezim Suharto menambah ketersingkirkan budaya Islam radikal sebagai bagian dari masyarakat budaya di Indonesia. Keadaan ini justru membuat komunitas budaya Islam stream ini menjadi semakin solid, dan mereka melakukan penajaman konsep yang diusungnya melalui kontak dengan negara-negara Timur Tengah yang semakin intens. Jika dimasa awal Islam Indonesia menghubungkan identitas mereka dengan Timur Tengah hanya dalam hubungan primordial terkait kebernilaian agama dalam kehidupan, misalnya dalam simbol pemberian gelar sultan bagi raja yang dianggap religius, gelar *syeh* untuk para guru agama, gelar haji bagi orang yang sudah menunaikan ibadah yang dianggap paling sulit dalam Islam karena melibatkan materi dan non materi, dll. kini kubu stream memperluas hubungan itu

dalam bentuk kajian kondisi Islam kontemporer yang lebih universal. Mereka mengadopsi konsep dan strategi-strategi umat Islam di belahan dunia timur dalam memandang dan bersikap terhadap dunia yang dihadapinya. Maka dalam pandangan kubu stream, konflik-konflik yang terjadi di berbagai dunia Islam merupakan bagian dari agama dan harus dihadapi dengan konsep-konsep agama pula. Hal ini dilakukan sebagai legitimasi kebenaran dari konsep-konsep, ide-ide, dan cara –cara beragama yang mereka suarakan. Hal ini juga adalah cara dari kubu Islam stream dalam mempertahankan identitasnya dari serangan kubu Islam mainstream, misalnya dari serangan wacana ketidak indonesiaan Islam kubu ini karena dianggap tidak sesuai dengan karakteristik orang Indonesia. Menamakan diri sebagai Islam murni, juga adalah cara kubu ini dalam menjawab serangan kubu Islam mainstream yang mengedepankan wacana kecocokan Islam mainstream pada karakter orang dan budaya Indonesia.

Adapun bagi kubu budaya Islam Moderat, sebagai budaya Islam mainstream di Indonesia yang mengklaim memiliki pengikut terbesar di Indonesia, kredibilitas identitasnya menjadi terusik ketika kubu budaya Islam stream berhasil melakukan gerakan massa yang kemudian menamakan diri dengan gerakan 212. Banyaknya massa yang bergabung dalam gerakan protes sosial ini,

yang kemudian mampu membuktikan diri sebagai penyelenggara gerakan aksi damai, tidak anarkis bahkan berhasil menjaga ketertiban dan kebersihan, menjadi antitesa terhadap image yang selama ini di tuduhkan pada Islam stream yang disebut radikal. Keberhasilan Islam stream mengumpulkan, memobilisasi dan menggerakkan massa dalam jumlah yang sangat besar, yang belum pernah dapat di lakukan oleh kubu budaya Islam mainstream, membuat identitas kubu mainstream menjadi tidak aman sebagai kubu yang mengklaim diri sebagai pengawal masyarakat Islam Indonesia yang ramah dan mengedepankan cara-cara tindakan yang damai.

Mulai populernya tokoh-tokoh dari kubu Islam stream, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi dari hari kehari sejak aksi massa 212 terjadi. Hal ini berdampak semakin menurunnya pamor para penyeru “islam yang ramah” ini, dan menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang mulai turun terkait makna “islam yang ramah” itu sendiri. sikap diam kubu mainstream pada berbagai isu nasional menjadi sebab berbaliknya perhatian publik dari mempercayai konsep yang di tawarkan Islam mainstream kepada aksi nyata yang di tunjukan Islam stream, apalagi secara politik, aksi ini terbukti memberikan hasil nyata.

Kegoncangan identitas di kedua kubu ini membuat keduanya saling serang terutama

dalam wacana media. Pertentangan semakin tajam justru ketika berita-berita itu di viralkan di media sosial oleh para pengikut dan simpatisan masing-masing kubu dan menimbulkan perang wacana yang semakin sengit.

Posisi Pemerintah Dalam Konflik

Sebagaimana dipaparkan diatas bahwa dalam peta konflik budaya Islam Indonesia pemerintah menjadi bagian dari konflik tersebut. dalam pandangan pemerintah, Islam stream ingin menghidupkan kembali ide negara Islam di indonesia yang juga membangkitkan kenangan masa lalu dimana kubu Islam pernah di menyandang label sebagai pemberontak negara, yang terjadi sebagai bentuk protes pada negara setelah tujuh kata piagam Jakarta dihilangkan. Kenangan ini kemudian menjadi alat interpretasi kejadian masa kini bahwa umat Islam stream dengan menggunakan sentimen agama kembali membangkang pada pemerintah, anti NKRI dll, yang merupakan ancaman bagi NKRI.

Berdasarkan kecurigaan tersebut maka pemerintah mendukung budaya Islam mainstream yang dipandang lebih Pancasila, dan pro pemerintah. Keberpihakan ini justru mmeperuncing konflik terutama ketika kecurigaan-kecurigaan mendapatkan momentumnya dalam peristiwa politik. Pemerintah bersama-sama kubu mainstream

kemudian menjadikan kubu Islam stream sebagai musuh bersama. Meski demikian, fenomena ini berdampak berbeda dalam perkembangan hubungan diantara kubu-kubu yang bertikai itu. Dalam hubungan budaya Islam stream dan mainstream meski masih diwarnai konflik terutama di tingkat elitnya, moment gerakan 212 sedikitnya berhasil mencairkan perbedaan –perbedaan budaya di tingkat akar rumput. Adapun hubungan Negara dengan Islam stream terutama pasca pembubaran HTI menunjukkan konflik yang semakin tajam. Lihatlah betapa kritisnya kubu ini terhadap apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hingga tarap tak lagi peduli apapun kebijakan tersebut, yang mereka lakukan hanyalah menyalahkan pemerintah.

Sebuah Ruang Dialog, Budaya Islam Mainstream Sebagai Penengah Antara Negara dengan Budaya Islam Stream

Fakta politik menunjukkan, meskipun dalam setiap pemilu pilpres hingga pemilu terakhir 2014 lalu partai politik Islam substantif masih kalah dibanding kubu politik sekuler, namun ia masih jauh lebih baik dari kubu partai politik formalis. Kedekatan konsep politik substantif dengan karakteristik Islam kultural indonesia yang menjadi komunitas mainstream nampaknya menjadi penyebabnya. Belum lagi para “kelompok diam” yang diam-diam menjadikan para

tokoh Islam substantif sebagai rujukan keberislamannya disatu sisi, tidak setuju pada konsep politik Islam formalis, namun disisi lain masih belum menjatuhkan pilihan pada kubu substantif dalam perjuangan politiknya. Hal ini sekurangnya mengindikasikan masih adanya harapan masyarakat Islam kepada model Islam substantif. oleh karena itu dalam mengatasi kekacauan sosial yang kini tengah melanda masyarakat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, partai politik pengusung ideologi substantif perlu berbenah diri.

Dalam fenomena 212 menunjukkan bahwa perjumpaan beragam budaya Islam menjadi penting dalam rangka dilakukan negosiasi Identitas yang lebih sehat. Kebersamaan yang terjadi dalam gerkan 212 yang meleburkan batas-batas budaya Islam radikal dan budaya Islam moderat, menunjukkan telah terjadi negosiasi identitas yang lebih *mindfulness*.

Meleburnya massa dari kedua kubu merupakan buah dari kesadaran bahwa perbaikan suatu kondisi hanya akan dapat diatasi dengan menghidupkan kembali manifestasi kultural dan budaya dari agama Islam, dan mensyaratkan keutuhan dunia Islam Indonesia, hal itu nyata terjadi pada moment 212. Bahwa konsep-konsep tentang keterhubungan yang materil dengan yang suci hanya dapat diterjemahkan oleh suatu budaya

yang berlandaskan agama. dan budaya Islam di Indonesia memiliki hal itu.

Hanya saja ketidak mampuan para pengusung ideologi substansif dalam memformulasikan bentuk nyata dari ideologi yang diusungnya, menjadi sebab kekacauan di massa Islam terjadi. Kegagalan ini bukan saja membangkitkan ideologi Islam formalis, namun juga menjadi celah eksploitasi dan pembelokan oleh oknum-oknum tertentu dalam menghimpun suara dari massa Islam kultural yang notabene paling dekat kesesuaiannya terhadap konsep ideologi substantif. Kesesuaian ini tentu saja merupakan kelanjutan konsep Islam kultural yang di gagas pada masa ordebaru dan mendapat sambutan baik dari pemerintah dan masyarakat Islam kebanyakan.

Berkaca pada sejarah, hal yang kemudian menjadi poin keberhasilan nabi muhammad dalam menghimpun “Ummah” salah satunya adalah keberhasilannya dalam menemukan substansi universal dari karakteristik budaya kaumnya kala itu. Nabi berhasil menemukan aspek transendental dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di tengah masyarakat madinah dan menjadikannya sebagai alat pemersatu. Contoh yang paling tekenal adalah bagaimana budaya persaudaraan berdasarkan klan yang sangat mengakar dalam masyarakat arab dirubah menjadi persaudaraan berdasarkan perjanjian berdasarkan kesamaan sebagai warga

madinah, kemudian konsep itu dihubungkan pada nilai transedentalnya dalam konsep “*ukhuah islamiyah*” atau yang oleh Ibn Khaldun di sebut sebagai konsep “ashobiyah”. Dengan demikian seluruh warga madinah memulai perjuangan mereka dalam mempertahankan kota berdasarkan konsep tersebut. dalam dunia modern mungkin kita perlu belajar pada negara Jepang misalnya, yang berhasil melakukan formalisasi nilai universal budayanya ke dalam dunia politik Jepang berupa fenomena harakiri-nya yang terkenal itu, sebagai kontrol sosial politik di Jepang.

Inilah PR yang perlu dilakukan oleh kubu substansif jika ingin berhasil dalam fungsinya sebagai penengah. Untuk mencari budaya budaya apakah yang ada dan mengakar di masyarakat yang dapat di selaraskan dengan nilai-nilai substansif dalam Islam, yang akan dijadikan konsep pembangunan yang akan di perjuangkannya di tingkat politik-negara.

4. KESIMPULAN

Transnasional baru yang terbentuk di dunia Islam mampu melampaui simbol dunia Islam klasik yaitu khilafah dan lebih mengutamakan substansi dari suatu hubungan lintas negara-bangsa. Mengkaji lebih dalam fenomena arab spring dan fenomena 212 akan memperjelas konsep baru ini dan membuka

harapan bagi kubu budaya Islam stream untuk keluar dari pertikaian dengan pemerintah.

Saling pengertian, saling memahami dan saling mendukung hanya dapat dicapai dengan memetakan kembali fungsi dan peran budaya-budaya Islam yang ada di Indonesia dalam suatu suasana kesetaraan antar budaya-budaya Islam yang ada, sebagai basis interaksi dan komunikasi antarbudaya yang sehat dan substansial menuju cita-cita pembangunan Indonesia

Disisi lain kedua fenomena ini juga dapat menjadi bahan pelajaran bagi kubu budaya Islam mainstream dalam menemukan suatu konsep integralisasi agama-negara yang dicita-citakan, sekaligus menjadi penengah dalam konflik segitiga yang terjadi antara negara, Islam stream dan Islam mainstream, terutama terkait kepercayaan pemerintah terhadap budaya Islam mainstream yang dipandang lebih mencerminkan karakter Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Assyari. 2017. Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif. Jurnal An-nida' Jurnal Pemikiran Islam Edisi Desember 2017 Vol. 41 No. 2
- Ahnaf Mohammad Iqbal. (2016) Tiga Jalan Islam Politik di Indonesia:

- Reformasi, Refolusi dan Revolusi. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Juli 2016: 127-40
- Azra, Azyumardi. 2006. *Sejarah Islam Indonesia*. Jakarta.UIN
- Benda, J. 1980. Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. Jakarta: Pustaka Jaya. (Asli *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945*. Den Haag: van Hoeve, 1958)
- Ekawati, Esty. 2015. Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Jurnal Penelitian Politik* | Volume 12 No. 1 Juni 2015 | 17–31
- Hasan, Nor. 2014. Agama dan Kekuasaan Politik Negara. *KARSA*, Vol. 22 No. 2, Desember 2014
- Herdiansah, Ari Ganjar. 2017. Pragmatisme Partai Islam Indonesia: Pendekatan Tindakan sosial. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol 1. No 2. 2017
- Mudzakir, Amin. 2016. Islam Politik dan jaringan Islam Transnasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 24, Nomor 1, Januari 2016.
- Nasution, Amran, Dkk, 1990. *Setelah Boom Sarjana Islam*. Majalah Tempo edisi Desember 2000 , hal 34-37.
- Sukamto, 2008. *Dinamika Politik Islam di Indonesia. Dari Masa Ordebaru Sampai Masa Reformasi. Enlightenment*, Bandung
- Shofwan, Arif Muzayin. 2016. Pandangan Hizbut Tahrir Terhadap Radikalisme Gerakan ISIS Dalam Menegakkan Khilafah. *Jurnal ADDIN*, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
- Ting-Toomey, Stella. 1999. *Communication Across Culture*. New York London. The Guilford Press.